

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tingginya jumlah laporan kriminalitas di data *base* Polri menyebabkan investor asing enggan untuk menaruh sahamnya di Indonesia, karena negara Indonesia dirasa tidak aman. Keengganan investor asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia menyebabkan sedikitnya lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan tingkat pengangguran juga meningkat. Faktor perkembangan ekonomi dapat mempengaruhi adanya tindakan kriminal. Semakin besar tuntutan ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah dapat mendorong faktor kriminalitas atau dengan kata lain himpitan ekonomi dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindak kriminal.

Beberapa faktor pendukung seperti halnya teknologi yang canggih, modus, teknik, dan cara melakukan kriminalitas pun semakin canggih pula. Sehingga menambah daftar angka kriminalitas di Indonesia semakin tinggi. Hal seperti inilah yang semakin membuat kekhawatiran investor asing untuk datang dan menaruh sahamnya di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tidak sejahtera dalam kehidupan sosialnya. Kemudian pemerintah mencari cara untuk menanggulangi tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman itu terdiri dari substansi hukum (*legal substance*) berkaitan dengan aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum (*legal structure*) lebih ditekankan

pada aplikasi dari suatu aturan yaitu aparat penegak hukum dan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan perilaku masyarakat. Ketiga unsur inilah menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar (Effendy, 2005: 1).

Negara hukum yang memiliki suatu aturan hukum, maka untuk mengaplikasikannya suatu aturan tersebut dibutuhkan penggerak dari aturan itu sendiri. Penggerak disini merupakan struktur dari penerapan aturan yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam hal implementasi dari sebuah aturan atau undang-undang, seperti dalam konsep Negara Indonesia memiliki Polisi, Jaksa, dan Hakim. Ketiganya merupakan suatu komponen penegak hukum.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian disini merupakan pengemban dari suatu penerapan aturan yang ditetapkan untuk menjaga stabilitas Negara khususnya, sehingga peran polisi sangat signifikan berkaitan dengan Tindak Pidana yang sering ditangani olehnya.

Namun, sayangnya jumlah anggota Polisi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang heterogen memicu terjadinya permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang semakin kompleks dengan modus operandi yang semakin beraneka ragam. Sementara masyarakat hanya bersifat pasif yaitu melapor jika ada tindak kriminal dan polisi menangani sendiri permasalahan kamtibmas. Hal ini menyebabkan polisi kelebihan beban

tugas sehingga dinilai sangat lamban oleh masyarakat bahkan masyarakat tidak percaya terhadap institusi Polri dan menyebabkan citra Polri buruk di masyarakat

Kepolisian Republik Indonesia berusaha memperbaiki citra Polri dengan berinisiatif untuk menanggulangi tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat menarik investor asing untuk masuk ke Negara ini yang aman, nyaman dan tentram. Polri melalui fungsinya yaitu satuan pembinaan masyarakat yang selanjutnya disingkat (Sat Binmas) berusaha untuk menyadarkan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban bermasyarakat di lingkungannya sendiri. Pada Tahun 2005 terbit Surat Keputusan Kapolri tentang program Perpolisian Masyarakat (selanjutnya disingkat Polmas) yaitu Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri.

Program Polmas ini berusaha mengajak masyarakat untuk dapat menjadi polisi untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya sehingga secara bersama-sama dapat menciptakan kamtibmas. Program ini diterapkan di seluruh lembaga Kepolisian di Indonesia tak terkecuali di Polres Bangkalan. Program Polmas adalah suatu konsep perpolisian yang menekankan kemitraan Polri dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, implementasi dari Polmas sendiri di lingkup warga dengan terbentuknya forum kemitraan polisi dan Masyarakat atau yang disingkat (FKPM). FKPM merupakan wahana komunikasi antara polisi dan warga yang didasarkan atas keputusan bersama dalam rangka pembahasan kamtibmas dan

masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Sutanto, 2006: 38). Di dalam FKPM terdapat ketua, wakil, sekretaris, dan seksie berdasarkan dengan komunitas yang ada di daerah masing-masing.

Sat Binmas Polres melakukan upaya maksimal dalam melaksanakan program Polmas yaitu melakukan pendekatan terhadap masyarakat, dan memberi pengetahuan tentang hukum, kesadaran hukum akan dilakukan secara intensif. Setiap bulan Sat Binmas Polres Bangkalan melakukan sosialisasi program Polmas ke tiga desa dan memberikan bantuan alat tulis kantor (ATK) kepada FKPM. Melakukan siaran keliling guna mengingatkan masyarakat akan pentingnya kamtibmas dan memberikan informasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan Polres, memberi arahan dan membina komunitas, sambang pada lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Polisi Masuk sekolah-sekolah dengan menjadi Inspektur upacara, memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan mengajarkan baris-berbaris kepada siswa, dan masih banyak kegiatan yang dilakukan oleh Sat Binmas Polres Bangkalan sebagai upaya agar masyarakat dapat lebih dekat dengan polisi dan dapat bekerja sama atau bermitra dengan polisi yaitu menjadi bagian dari Polmas sehingga dapat menciptakan kamtibmas.

Hingga saat ini telah berdiri sebanyak 71 FKPM yang tersebar di wilayah kabupaten Bangkalan akan tetapi tidak semua FKPM tersebut aktif serta belum menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan nyata dalam penanggulangan tindak kriminal, hal ini dikarenakan sulitnya masyarakat untuk diajak kerja sama dalam

menjalankan program Polmas. Masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan pekerjaannya dari pada untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan program Polmas. Terutama untuk masyarakat pedesaan yang lebih memilih untuk bekerja dan menghasilkan uang dibandingkan mengurus hal yang tidak dapat menghasilkan uang. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah mengakibatkan masyarakat kurang tertarik untuk mengerti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sikap masyarakat yang tidak peduli dan masa bodoh akan adanya program Polmas untuk menciptakan kamtibmas menjadi salah satu faktor masih terciptanya tindak kriminal di lingkungan masyarakat Bangkalan. Seperti yang dilansir oleh harian *online* Madura Terkini pada 29 Desember 2012 bahwa Kasus kriminal di Polres Bangkalan setiap tahun cenderung meningkat. Di tahun 2012 kasus kriminal yang ditangani Polres meningkat sebanyak 60 kasus dibanding tahun sebelumnya (2011). Pada tahun 2011, kasus kriminal yang terjadi sebanyak 401 kasus. Sementara tahun 2012 naik menjadi 460 kasus. Berbeda dengan Polres Sampang, pada tahun 2011 angka kriminal yang terjadi sebesar 368 kasus sementara tahun 2012 sebanyak 317 kasus, hal ini mengalami penurunan. Penurunan angka kriminalitas juga terjadi di wilayah hukum Polres Pamekasan yaitu pada tahun 2011 mencapai 699 kasus sementara pada tahun 2012 terdapat 550 kasus (Anonim, <http://www.maduraterkini.info>, akses 7 April 2013 pukul 15:19).

Akibat dari kenaikan angka kriminalitas, tunggakan pengungkapan kasus yang ditangani oleh Polres Bangkalan juga semakin bertambah yaitu sedikitnya

ada 239 kasus kriminal. Dari keseluruhan kasus kriminal yang berada di posisi pertama dan kasus kriminal paling tinggi adalah kasus pidana curat (pencurian dengan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan) dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor), penganiayaan dan kasus narkoba. Beberapa kasus itu masih mendominasi dari laporan kriminal yang masuk ke meja Polres. Bahkan, hampir mencapai 70 persen. Sisanya, kasus pemerkosaan, pencabulan, KDRT, penipuan dan penggelapan serta sajam dan senpi. Kasus lainnya, seperti miras, judi, dan unjuk rasa juga tetap menjadi atensinya. Begitu juga kasus paling banyak yang belum berhasil diungkap polisi, didominasi kasus curat dan curas.

AKBP Endar Priantoro ketika masih menjabat sebagai Kapolres Bangkalan mengatakan kepada harian *Online Madura Terkini* bahwa banyaknya kasus yang belum berhasil diselesaikan disebabkan adanya sejumlah kendala yang dihadapi penyidik. Kendala paling utama adalah kurangnya saksi dan barang bukti. Warga banyak yang tidak mau dijadikan saksi sekalipun melihat langsung kejadiannya. Ketika dipanggil polisi mereka menganggap akan dihukum dan bersalah (Anonim, <http://www.maduraterkini.info>, akses 7 April 2013 pukul 15:19).

Dari banyaknya kasus tersebut dapat dikatakan bahwa kemitraan antara polisi dan FKPM dalam mencegah terjadinya tindak kriminal dan menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat belum menunjukkan kondisi yang memadai. Program Polmas perlu disosialisasikan dengan cara bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat maupun institusi mengenai arti pentingnya rasa aman dan tertib secara bersama-sama. Adanya rasa aman dan tertib dalam

tubuh individu maka akan menciptakan ketidakegoisan dan memberikan adanya peluang dalam terciptanya rasa aman dan tertib kepada orang lain. Serta dalam tubuh institusi, akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung rasa aman, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses komunikasi yang dilakukan oleh Sat Binmas dalam melaksanakan Program Polmas. Peneliti tertarik untuk mengambil judul “Proses Komunikasi Satuan Pembinaan Masyarakat dalam Sosialisasi Program Perpolisian Masyarakat (Studi di Polres Bangkalan Madura)”.

Penelitian di Lingkup Kepolisian pernah dilakukan oleh Dinar Amry Hisbullah pada tahun 2012 yaitu “Strategi Komunikasi Binamitra Masyarakat Kepolisian Resor (Polres) Majalengka melalui Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam Menciptakan Masyarakat Majalengka Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas),” penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Binamitra Masyarakat Kepolisian Resor (POLRES) Majalengka Melalui Program keamanan dan Ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) melalui kategori antarkomponen Strategi Komunikasi diantaranya Mengenali Sasaran Komunikasi, Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi, Pemilihan Media Komunikasi, dan Peranan Komunikator dalam komunikasi. Sementara judul peneliti mengenai Proses Komunikasi Satuan Pembinaan Masyarakat dalam sosialisasi program perpolisian masyarakat dengan mengambil studi di Polres Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

Proses Komunikasi Sat Binmas Polres Bangkalan dalam sosialisasi program Polmas dan hambatan komunikasi dalam sosialisasi program Polmas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Komunikasi Satuan Pembinaan Masyarakat dalam Sosialisasi Program Perpolisian Masyarakat (Studi di Polres Bangkalan Madura)?
2. Apa Hambatan Komunikasi dalam sosialisasi program Polmas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Proses Komunikasi Satuan Pembinaan Masyarakat dalam Sosialisasi Program Perpolisian Masyarakat (Studi di Polres Bangkalan Madura).
2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi dalam sosialisasi program Polmas.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu komunikasi yang berkaitan dengan proses komunikasi Sat Binmas dalam sosialisasi program Polmas.

b. Manfaat Praktis**a) Bagi Sat Binmas Polres Bangkalan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran proses komunikasi dan hambatan komunikasi kepada Sat Binmas Polres Bangkalan atas sosialisasi program Polmas yang telah dijalankan dan dapat memperbaiki komponen dalam proses komunikasinya.

b) Bagi Masyarakat

Mengenalkan kepada masyarakat mengenai program Polmas melalui proses komunikasi yang dilakukan oleh Sat Binmas dalam sosialisasi program Polmas dan memberi kepercayaan kepada masyarakat atas Polri sehingga dapat bersama-sama menjalankan Polmas.